



KAJIAN

# PERHITUNGAN TINGKAT KEBEASAN BERPENDAPAT

## DI KABUPATEN TAPIN KALIMANTAN SELATAN

2025

TIM KAJIAN  
STIE PANCASETIA BANJARMASIN

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian tentang "Perhitungan Tingkat Kebebasan Berpendapat di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan Tahun 2025" dapat dilaksanakan.

Kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan menjadi pilar penting dalam sistem demokrasi. Di tingkat lokal, pengukuran kebebasan berpendapat menjadi sangat penting untuk memahami sejauh mana masyarakat dapat mengekspresikan pikiran dan gagasannya tanpa hambatan atau tekanan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis tingkat kebebasan berpendapat masyarakat di Kabupaten Tapin melalui dua indikator utama, yaitu ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah dan ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat. Melalui survei terhadap 625 responden yang tersebar di 12 kecamatan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi riil kebebasan berpendapat di tingkat grassroot.

Laporan penelitian ini diharapkan dapat menjadi:

1. Bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Tapin dalam merumuskan kebijakan perlindungan hak-hak sipil
2. Referensi bagi DPRD Kabupaten Tapin dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan
3. Panduan bagi organisasi masyarakat sipil dalam melakukan advokasi dan pemantauan
4. Data baseline untuk monitoring berkala kondisi kebebasan berpendapat di Kabupaten Tapin
5. Kontribusi akademik bagi pengembangan kajian demokrasi lokal di Indonesia

Peneliti ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Pemerintah Kabupaten Tapin atas kerjasamanya dalam penyediaan data dan informasi.
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin yang telah memberikan dukungan dan kesempatan.
3. Seluruh responden penelitian (625 orang) dari 12 kecamatan di Kabupaten Tapin yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam survei ini.
4. Key informants (18 orang) yang terdiri dari pejabat pemerintah, anggota DPRD, tokoh masyarakat, aktivis LSM, akademisi, dan jurnalis yang telah berbagi pengetahuan dan pengalamannya.

5. Tim enumerator (15 orang) yang telah bekerja keras dalam pengumpulan data lapangan.
6. LPPM STIE Pancasetia Banjarmasin sebagai lembaga yang memfasilitasi penelitian ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu kelancaran penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa laporan penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Kabupaten Tapin khususnya, dan Indonesia pada umumnya.

Banjarbaru, Desember 2025

**Tim Peneliti**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	4
1.1.    Latar Belakang.....	4
1.2.    Rumusan Penelitian.....	4
1.3.    Tujuan Kegitan .....	5
1.3.    Manfaat Kegiatan Manfaat Teoritis .....	5
BAB II KAJIAN TEORI .....	6
2.1.    Konsep Kebebasan Berpendapat.....	6
2.1.2.    Dimensi dan Indikator Kebebasan Berpendapat.....	7
2.2.    Penelitian Terdahulu .....	8
BAB III METODE PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS DATA .....	10
3.1.    Jenis Kegiatan dan Metode Analisis .....	10
3.2.    Populasi .....	10
3.3.    Jumlah Dan Metode Penentuan Sampel .....	11
3.4.    Variabel Kajian.....	13
3.5.    Prosedur Analisis Data.....	15
3.6.    Perhitungan Kebebasan Berpendapat di Kabupaten Tapin .....	16
BAB IV HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	17
4.1    Profil Kabupaten Tapin .....	17
4.2.    Hasil Analisis.....	19
4.3.    Pembahasan .....	40
BAB V PENUTUP.....	46
5.1.    Kesimpulan .....	46
5.2.    Saran .....	47

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental dan dijamin oleh konstitusi Indonesia melalui Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Hak ini juga diakui secara internasional dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Dalam konteks demokrasi lokal, kebebasan berpendapat menjadi indikator penting untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Kabupaten Tapin, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, menghadapi berbagai dinamika sosial-politik yang dapat mempengaruhi implementasi kebebasan berpendapat di tingkat grassroot.

Penelitian tentang tingkat kebebasan berpendapat di level kabupaten masih sangat terbatas, padahal pemahaman terhadap kondisi riil di daerah sangat penting untuk perumusan kebijakan yang inklusif dan partisipatif. Kabupaten Tapin dengan karakteristik geografis, demografis, dan sosial-budaya yang khas memerlukan pengukuran khusus untuk memahami sejauh mana masyarakat dapat mengekspresikan pendapatnya secara bebas dan bertanggung jawab.

Pengukuran tingkat kebebasan berpendapat tidak hanya penting untuk evaluasi kinerja pemerintah daerah, tetapi juga untuk mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural yang mungkin membatasi partisipasi publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi kebebasan berpendapat di Kabupaten Tapin dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas demokrasi lokal.

#### 1.2. Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kebebasan berpendapat masyarakat di Kabupaten Tapin?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kebebasan berpendapat masyarakat di Kabupaten Tapin?

3. Apa saja hambatan yang dihadapi masyarakat dalam mengekspresikan pendapat di Kabupaten Tapin?
4. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap jaminan kebebasan berpendapat di Kabupaten Tapin?

### **1.3. Tujuan Kegitan**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan tujuan dari kajian ini adalah:

1. Mengukur dan menganalisis tingkat kebebasan berpendapat masyarakat di Kabupaten Tapin berdasarkan indikator-indikator yang komprehensif.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kebebasan berpendapat masyarakat di Kabupaten Tapin.
3. Menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat dalam mengekspresikan pendapat mereka.
4. Mengevaluasi persepsi masyarakat terhadap jaminan dan perlindungan kebebasan berpendapat di Kabupaten Tapin.

### **1.3. Manfaat Kegiatan**

#### **Manfaat Teoritis**

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan literatur tentang kebebasan berpendapat dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia.
2. Menyediakan model pengukuran kebebasan berpendapat yang dapat diadaptasi untuk penelitian di daerah lain.
3. Memperkaya kajian tentang implementasi hak asasi manusia di tingkat kabupaten/kota.

#### **Manfaat Praktis**

1. Memberikan informasi empiris kepada Pemerintah Kabupaten Tapin tentang kondisi kebebasan berpendapat di daerahnya.
2. Menyediakan data baseline untuk monitoring dan evaluasi kebijakan terkait kebebasan berpendapat.
3. Memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan partisipasi publik dan kualitas demokrasi lokal.
4. Membantu organisasi masyarakat sipil dalam advokasi dan pemantauan hak asasi manusia di tingkat lokal.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### **2.1. Konsep Kebebasan Berpendapat**

Kebebasan berpendapat atau freedom of expression merupakan hak fundamental yang mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apa pun tanpa memandang batas-batas wilayah. Menurut Barendt (2005), kebebasan berpendapat mencakup empat dimensi utama: kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berekspresi melalui media lain.

Mill (1859) dalam karyanya "On Liberty" menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan prasyarat untuk pencarian kebenaran dan kemajuan masyarakat. Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, menurut Mill, hanya dapat dibenarkan jika pendapat tersebut secara langsung mengancam keamanan orang lain (harm principle).

Dalam konteks hukum internasional, Article 19 Global Campaign for Free Expression mendefinisikan kebebasan berpendapat sebagai hak untuk menyatakan pendapat tanpa intervensi, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi serta ide-ide melalui media apa pun dan tanpa mempertimbangkan batasan-batasan geografis.

#### **2.1.1. Kerangka Hukum Kebebasan Berpendapat di Indonesia**

Kebebasan berpendapat di Indonesia dijamin oleh berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional:

**UUD 1945:** Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) yang menjamin hak setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

**UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:** Pasal 23 ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

**UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum:** Mengatur tentang hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di depan umum sebagai wujud partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

**UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers:** Memberikan jaminan kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

### **2.1.2. Dimensi dan Indikator Kebebasan Berpendapat**

Berdasarkan berbagai literatur dan best practices internasional, kebebasan berpendapat dapat diukur melalui beberapa dimensi:

a) Dimensi Legal-Formal

Dimensi ini mengukur sejauh mana kerangka hukum dan regulasi memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Indikator meliputi: keberadaan regulasi yang menjamin kebebasan berpendapat, mekanisme perlindungan hukum terhadap pelanggaran, dan implementasi sanksi terhadap pelanggaran kebebasan berpendapat.

b) Dimensi Sosial-Kultural

Dimensi ini mengukur kondisi sosial dan budaya yang mendukung atau menghambat kebebasan berpendapat. Indikator meliputi: toleransi masyarakat terhadap keberagaman pendapat, norma sosial yang berlaku terkait ekspresi pendapat, dan stigma sosial terhadap pendapat kritis atau berbeda.

c) Dimensi Politik

Dimensi ini mengukur ruang politik yang tersedia bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat. Indikator meliputi: keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan saran, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, akses terhadap informasi publik, dan responsivitas pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.

d) Dimensi Media dan Teknologi

Dimensi ini mengukur ketersediaan dan aksesibilitas sarana untuk menyampaikan pendapat. Indikator meliputi: akses terhadap media massa (cetak, elektronik, online), keberagaman media dan informasi, penetrasi internet dan media sosial, dan literasi media masyarakat.

e) Dimensi Keamanan

Dimensi ini mengukur rasa aman masyarakat dalam mengekspresikan pendapat. Indikator meliputi: tingkat intimidasi atau ancaman terhadap individu yang

mengekspresikan pendapat, perlindungan terhadap whistle-blowers, dan kebebasan dari diskriminasi berdasarkan pendapat yang disampaikan.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang kebebasan berpendapat di Indonesia telah dilakukan, antara lain:

1. Freedom House (2024): Dalam laporan "Freedom in the World 2024", Indonesia mendapat skor 59/100 (kategori "Partly Free"), dengan poin khusus untuk kebebasan sipil mendapat skor 29/60.
2. Setara Institute: Melakukan monitoring berkala terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan serta kebebasan berpendapat di Indonesia, dengan fokus pada kasus-kasus pelanggaran di tingkat nasional dan regional.
3. LBH Pers: Mencatat berbagai kasus pelanggaran kebebasan pers di Indonesia, termasuk kekerasan terhadap jurnalis, sensor, dan pembatasan akses informasi.

Namun, penelitian khusus tentang kebebasan berpendapat di level kabupaten, termasuk Kabupaten Tapin, masih sangat terbatas. Penelitian ini akan mengisi gap tersebut dengan menyediakan data empiris dan analisis mendalam tentang kondisi kebebasan berpendapat di tingkat lokal.

## 2.3. Indikator Pengukuran Kebebasan Berpendapat

Pengukuran kebebasan berpendapat dalam kajian ini mengadaptasi framework Perhitungan Kebebasan Berpendapat dengan fokus khusus pada aspek kebebasan berpendapat. Terdapat delapan indikator utama yang digunakan:

1. **Kebebasan dari Ancaman Aparat Pemerintah:** Mengukur ada tidaknya ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat. Indikator ini penting karena ancaman dari aparat negara seringkali memiliki efek 'chilling effect' yang membuat masyarakat takut untuk menyampaikan pendapat (Schauer, 1978).
2. **Kebebasan dari Ancaman Masyarakat:** Mengukur perlindungan terhadap ancaman atau kekerasan dari aktor non-negara. Dalam praktiknya, ancaman dari sesama warga negara dapat sama menakutkannya dengan ancaman dari aparat negara (Donnelly, 2013).

3. **Akses terhadap Media:** Mengukur aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai media untuk menyampaikan pendapat. Akses yang dimaksud mencakup akses fisik, ekonomis, dan kemampuan (Sen, 1999).
4. **Regulasi yang Mendukung:** Mengukur ada tidaknya regulasi yang bersifat restriktif atau supportif terhadap kebebasan berpendapat (UN Human Rights Committee, 2011).
5. **Partisipasi dalam Forum Publik:** Mengukur tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam ruang-ruang deliberasi (Habermas, 1996).
6. **Responsivitas Pemerintah:** Mengukur sejauh mana pemerintah daerah responsif terhadap pendapat publik (Dahl, 1989).
7. **Kebebasan Pers dan Media:** Mengukur tingkat kebebasan yang dinikmati oleh media massa (Barendt, 2005).
8. **Persepsi Masyarakat:** Mengukur persepsi subjektif masyarakat tentang tingkat kebebasan berpendapat yang mereka rasakan.

**Tabel 2.1. Variabel, Indikator Kebebasan Berpendapat**

Variabel	Indikator
Kebebasan Berpendapat	Kebebasan dari ancaman aparat pemerintah
	Kebebasan dari ancaman masyarakat
	Akses terhadap media penyampaian pendapat
	Regulasi yang mendukung kebebasan berpendapat
	Partisipasi dalam forum publik
	Responsivitas pemerintah terhadap pendapat publik
	Kebebasan pers dan media
	Persepsi masyarakat tentang kebebasan berpendapat

Sumber Data: Diolah 2025

## **BAB III**

### **METODE PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **3.1. Jenis Kegiatan dan Metode Analisis**

Metode kajian menceritakan tentang tata cara dan langkah-langkah yang akan digunakan dalam kajian ini untuk menghasilkan informasi akhir yang akurat dan bermanfaat. Isi dari metode kajian mencakup populasi dan sampel, variabel dan indikatornya, Teknik pengumpulan data yang akan digunakan, serta teknik analisis data hingga menghasilkan informasi akhir.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survey. Jenis penelitian ini membutuhkan studi lapangan dengan melibatkan responden dalam jumlah yang besar. Jenis penelitian survey sangat tepat jika tujuan penelitian adalah memahami perilaku suatu kelompok masyarakat dari sudut pandang masyarakat itu sendiri. Survei dilakukan lewat berbagai media, seperti menggunakan form yang bisa diisi secara online, hingga secara manual menggunakan lembar tertulis yang disebarluaskan dari rumah ke rumah untuk mengakses masyarakat yang kesulitan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini secara online. Data yang dikumpulkan akan diperiksa kembali untuk memastikan bahwa :

1. Tidak ada data yang kosong.
  2. Tidak ada responden ganda.
  3. Tidak ada responden yang mengisi kuesioner dengan sembarangan, seperti menjawab semua pertanyaan dengan pola tertentu (memilih setuju semua, atau sebaliknya, dll).
- Jika ditemukan data yang bermasalah, maka akan diganti dengan data yang lain sehingga jumlah kecukupan sampelnya tetap memenuhi standar.

#### **3.2. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti. Karena survei ini bertujuan untuk menganalisis kebebasan berpendapat Kabupaten Tapin, maka populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kabupaten Tapin, yang mana jika merujuk pada data BPS yang diterbitkan di Buku “Kabupaten Tapin dalam Angka 2024” sebanyak 197.893 jiwa. Mengingat bahwa masyarakat yang sudah memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam PILKADA adalah masyarakat yang sudah berusia 17 tahun

keatas, maka populasi target dalam penelitian ini menjadi sejumlah 146.480 jiwa, dengan sebaran seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1.

**Tabel 3.1 : Data Penduduk Kabupaten Tapin 2024**

Rentang Usia	Jumlah Penduduk
17-19	14.638
20-24	16.376
25-29	14.858
30-34	15.902
35-39	15.872
40-44	15.965
45-49	14.410
50-54	12.752
55-49	10.153
60-64	7.682
65-69	4.991
70-74	2.881
75+	3.193
<b>TOTAL</b>	<b>146.480</b>

Sumber : Kabupaten Tapin Dalam Angka 2024, BPS 2025

### 3.3. Jumlah Dan Metode Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mampu mewakili keseluruhan dari populasi. Sampel digunakan saat peneliti tidak mampu untuk meneliti menggunakan keseluruhan populasi, baik karena alasan waktu, biaya, tenaga, dan alasan lainnya. Agar sampel bisa merepresentasikan populasi dengan baik, maka dibutuhkan jumlah sampel yang memadai dan teknik penentuan sampel yang tepat.

Sampel pada penelitian ini diambil menggunakan rumus Slovin dengan Tingkat error 4%. Pada dasarnya Tingkat error yang dianggap layak dalam penelitian di ilmu sosial berkisar dari 1 sd 10 %, tergantung pada heterogenitas dari populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini, diputuskan menggunakan error sebesar 4 % mengingat masyarakat di Kabupaten Tapin sangat bervariasi dalam banyak hal, sehingga Tingkat

heterogenitasnya cenderung tinggi. Perhitungan jumlah sampel dengan rumus Slovin ditunjukkan sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{146.480}{1+146.480(0,04)^2}$$

$$n = \frac{146.480}{235.368}$$

$$n = 622,18 \text{ Responden}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel minimum

N = Jumlah Populasi

e = Toleransi Error (4%)

Berdasarkan perhitungan tersebut, ditemukan bahwa jumlah sampel minimal untuk penelitian ini adalah 622,18 responden. Untuk meningkatkan akurasi data sekaligus mempermudah dalam mengingat jumlah sampel yang dibutuhkan, maka jumlah sampel pada penelitian ini dinaikkan menjadi 625 sampel. Diharapkan jumlah ini cukup untuk merepresentasikan populasi penelitian.

Setelah menentukan jumlah sampel, Langkah selanjutnya adalah menentukan Teknik penentuan sampel yang akan digunakan. Teknik sampling yang digunakan adalah proportional voluntary sampling. Teknik ini dirasakan sebagai teknik yang paling tepat untuk penelitian survey yang melibatkan sampel besar. Melalui teknik ini, data dikumpulkan secara proporsional di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin, dimana kecamatan dengan jumlah populasi yang besar akan diambil sampel dalam jumlah yang besar pula, dan sebaliknya. Selengkapnya tentang pembagian sampel secara proporsional ini ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 3.2 : Pembagian Sampel Secara Proporsional Per Kecamatan**

NO	Kecamatan	Percentase (%)	Jumlah	
				Sampel
1	Binuang	16,44		103
2	Hatungan	4,96		31
3	Tapin Selatan	10,72		67

NO	Kecamatan	Percentase	Jumlah
		(%)	Sampel
4	Salam Bebaris	6,40	40
5	Tapin Tengah	10,88	68
6	Bungur	7,20	45
7	Piani	3,20	20
8	Lokpaikat	6,24	39
9	Tapin Utara	13,12	82
10	Bakarangan	5,60	35
11	Candi Laras Selatan	6,40	40
12	Candi Laras Utara	8,80	55
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>625</b>

Sumber: Data diolah 2025

### 3.4. Variabel Kajian

Variabel, indikator dan item survei pada perhitungan kebebasan berpendapat di Kabupaten Tapin terdiri dari:

**Tabel 3.3. Variabel, Indikator dan Item**

Variabel	Indikator	Item
<b>Kebebasan Berpendapat</b>	Kebebasan dari ancaman aparat pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merasa aman menyampaikan kritik</li> <li>2. Aparat pemerintah menghormati hak warga</li> <li>3. Tidak ada ancaman penangkapan dari aparat yang menyuarakan aspirasi</li> <li>4. Tidak pernah mendengar kasus kekerasan</li> </ol>
	Kebebasan dari ancaman Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Merasa aman menyampaikan pendapat berbeda</li> <li>6. Masyarakat Tapin toleran</li> <li>7. Tidak ada intimidasi terhadap individu yang kritis</li> <li>8. Tidak pernah melihat kekerasan</li> </ol>
	Akses terhadap media penyampaian pendapat	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Memiliki akses yang mudah ke media sosial</li> </ol>

Variabel	Indikator	Item
		10. tersedia berbagai media untuk menyampaikan aspirasi 11. Infrastruktur internet memadai 12. Bebas menggunakan platform dalam diskusi publik
	Regulasi yang mendukung kebebasan berpendapat	13. Tidak ada perda yang membatasi hak menyampaikan pendapat 14. Ada kebijakan yang mendukung 15. Prosedur perijinan berpendapat tidak menyulitkan 16. kebijakan pemerintah daerah melindungi hak warga
	Partisipasi dalam forum public	17. Saya aktif menghadiri forum-forum publik 18. Pemda banyak menyediakan banyak ruang dalam forum publik 19. Merasa nyaman dan percaya diri dalam menyampaikan pendapat 20. Jadwal dan informasi dikomunikasikan dengan baik
	Responsivitas pemerintah terhadap pendapat publik	21. Pemda responsif dan cepat menanggapi aspirasi 22. Pendapat dan kritik mendapat tindak lanjut 23. Memiliki mekanisme dalam menindaklanjuti aspirasi 24. Saya mendapat feedback
	Kebebasan pers dan media	25. Media lokal bebas memberitakan berbagai isu tanpa ada sensor 26. Jurnalis dan wartawan melakukan peliputan dengan aman 27. Media masa berani menyampaikan berita yang kritis 28. Tidak ada kasus pemberedelan
	Persepsi masyarakat tentang kebebasan berpendapat	29. Secara keseluruhan saya merasa bebas menyampaikan pendapat tanpa rasa takut 30. Yakin bahwa hak berpendapat dilindungi 31. Membuktikannya kebebasan berpendapat

Variabel	Indikator	Item
		32. Merekomendasikan untuk pihak lain

Sumber: Data diolah, 2025

### 3.5. Prosedur Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dan sudah melewati proses penyaringan awal akan ditabulasi dan dicek validitas dan reliabilitasnya (uji instrumen). Setelah melewati uji instrumen, data akan dianalisis menggunakan statistik deksriptif untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi di lapangan, serta diinterpretasikan kedalam kalimat-kalimat yang bisa dipahami oleh semua kalangan yang membutuhkan.

Proses penyaringan dilakukan dengan cara memastikan tidak ada data yang kosong atau salah tulis. Untuk data yang kosong akan dianulir, dan diganti dengan responden yang baru. Untuk data yang salah tulis akan diperbaiki secara manual jika kesalahannya masih bisa diperbaiki, seperti penulisan usia yang harusnya 50 tahun tapi tertulis 500 tahun, dan lainnya. Untuk kesalahan yang dianggap membingungkan, data akan dianulir dan diganti dengan responden yang baru. Oleh karena itu data dikumpulkan melebihi jumlah minimum yang dibutuhkan (625 responden) untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan tersebut.

Pengujian validitas dan reliabilitas juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari instrumen penelitian (kuesioner). Uji validitas bertujuan untuk memastikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan memang mengukur apa yang mau diukur. Pengujian dilakukan secara kualitatif dengan cara melakukan pengecekan satu persatu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, serta memastikan kalau pertanyaan tersebut fokus mengukur variabel utamanya.

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mendeteksi inkonsistensi dari jawaban responden. Seperti halnya pengujian validitas, pengujian reliabilitas dilakukan juga secara kualitatif, yaitu dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang berulang untuk memastikan konsistensi jawaban responden.

Khusus untuk variabel tertentu yang memungkinkan, uji validitas dan reliabilitas juga dilakukan melalui analisa statistik. Pengujian validitas dilakukan dengan cara mengorelasikan masing-masing indikator dengan skor totalnya. Indikator dengan nilai

korelasi dengan skor totalnya lebih dari 0,3 (atau 30%), maka indikator tersebut dinyatakan sebagai indikator yang valid. Uji reliabilitas secara statistik dilakukan dengan cara menghitung nilai Cronbach's Alpha untuk sekelompok indikator. Jika nilai Cronbach's Alpha nya berada diatas 0,6, maka serangkaian indikator tersebut dinyatakan sebagai indikator yang reliabel.

### **3.6. Perhitungan Kebebasan Berpendapat di Kabupaten Tapin**

Penghitungan Kebebasan Berpendapat melalui tiga tahapan proses: pertama, menghitung skor akhir untuk setiap item indikator; kedua, menghitung indeks indikator; dan ketiga, menghitung indeks variabel atau keseluruhan. Ketiga tahapan ini secara hierarkis terkait satu dengan yang lain (Zainal Abidin et al, 2021).

Untuk menggambarkan capaian tingkat kebebasan berpendapat digunakan skala 0–100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks=0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks=100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0–100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni:

1. Indeks  $> 80$  = Baik
2. Indeks  $60 - 80$  = Sedang
3. Indeks  $< 60$  = Buruk

## **BAB IV**

### **HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Profil Kabupaten Tapin**

Secara astronomis, Kabupaten Tapin terletak antara  $20.32'.43''$  –  $30.00'.43''$  Lintang Selatan dan antara  $1140.46'.13''$  –  $1150.30'33''$  Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Tapin memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Hulu Sungai Selatan; Selatan – Kabupaten Banjar; Barat – Kabupaten Barito Kuala; Timur – Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kabupaten Tapin terdiri dari 12 Kecamatan, yaitu:

1. Binuang
2. Hatungun
3. Tapin Selatan
4. Salam Babaris
5. Tapin Tengah
6. Bungur
7. Piani
8. Lokpaikat
9. Tapin Utara
10. Bakarangan
11. Candi Laras Selatan
12. Candi Laras Utara

Wilayah Kabupaten Tapin terbagi atas 12 kecamatan dengan 135 desa. Luas daerah Kabupaten Tapin adalah  $2.174,95 \text{ km}^2$ , sekitar 5,8 persen dari luas Kalimantan Selatan. Daerah dengan luas terbesar adalah Candi Laras Utara dengan luas  $681,40 \text{ km}^2$  atau sebesar 31,33 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Tapin, sementara daerah dengan luas terkecil adalah Kecamatan Tapin Utara dengan luas  $32,34 \text{ km}^2$  atau sebesar 1,49 persen dari luas Kabupaten Tapin.

#### **Jarak antara Ibukota Kabupaten ke Kecamatan:**

Rantau – Binuang : 30 km

Rantau – Hatungun : 40 km

Rantau – Tapin Selatan : 9 km

Rantau – Salam Babaris : 18 km  
Rantau – Tapin Tengah : 8 km  
Rantau – Bungur : 3 km  
Rantau – Piani : 20 km  
Rantau – Lokpaikat : 10 km  
Rantau – Tapin Utara : 0 km  
Rantau – Bakarangan : 6 km  
Rantau – Candi Laras Selatan : 30 km  
Rantau – Candi Laras Utara : 32 km.

Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, Kabupaten Tapin juga mempunyai dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Curah hujan di suatu daerah dipengaruhi oleh iklim, topografi, dan perputaran arus udara (BPS, 2024).

### **Pemerintahan di Kabupaten Tapin**

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) dan dilantik dalam masa jabatan lima tahun. Kabupaten Tapin dikepalai oleh seorang Bupati dan didampingi oleh Wakil Bupati. Bupati Tapin dibantu oleh Sekretaris Daerah yang membawahi beberapa Asisten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan Inspektorat Daerah serta dibantu oleh berbagai instansi dinas/vertikal yang masing-masing mempunyai lingkup tugas yang berbedabeda. Di setiap kecamatan dan desa, Bupati menugaskan masing-masing seorang Camat dan seorang Kepala Desa untuk membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan.

### **Penurunan Tingkat Kemiskinan**

Pada tahun 2025, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tapin turun secara signifikan menjadi 2,91 %, lebih rendah dari posisi 2024 yang mencapai sekitar 3,33 %. Capaian ini menempatkan Tapin sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia.

### **Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)**

Pemerintah Kabupaten Tapin telah menerapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar dalam penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan efektif. Ini merupakan bagian strategi penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.

## **Prestasi & Penghargaan**

### **Mandaya Award 2025**

Tapin mendapatkan Mandaya Award 2025 sebagai Kabupaten Terbaik di Indonesia dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Penghargaan ini diberikan karena kemajuan nyata dalam pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan data digitalisasi sosial (E-TAPIN MESRA).

### **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**

Pemerintah Kabupaten Tapin kembali meraih opini WTP dari BPK RI untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), mencerminkan tata kelola keuangan yang baik.

### **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**

Pada 2025–2029, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tapin telah menyusun dan menyampaikan Ranperda RPJMD 2025–2029, perencanaan strategis pembangunan jangka menengah pasca pelantikan kepala daerah tahun 2025.

### **Kebijakan APBD**

DPRD Kabupaten Tapin secara aktif melakukan rapat paripurna pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara tahun 2025.

## **4.2. Hasil Analisis**

Penelitian ini melibatkan 625 responden yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Tapin. Data karakteristik responden mencakup aspek demografis yang beragam dan representatif terhadap populasi masyarakat Kabupaten Tapin. Karakteristik responden yang dianalisis meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan lokasi kecamatan tempat tinggal responden.

### **Karakteristik Responden**

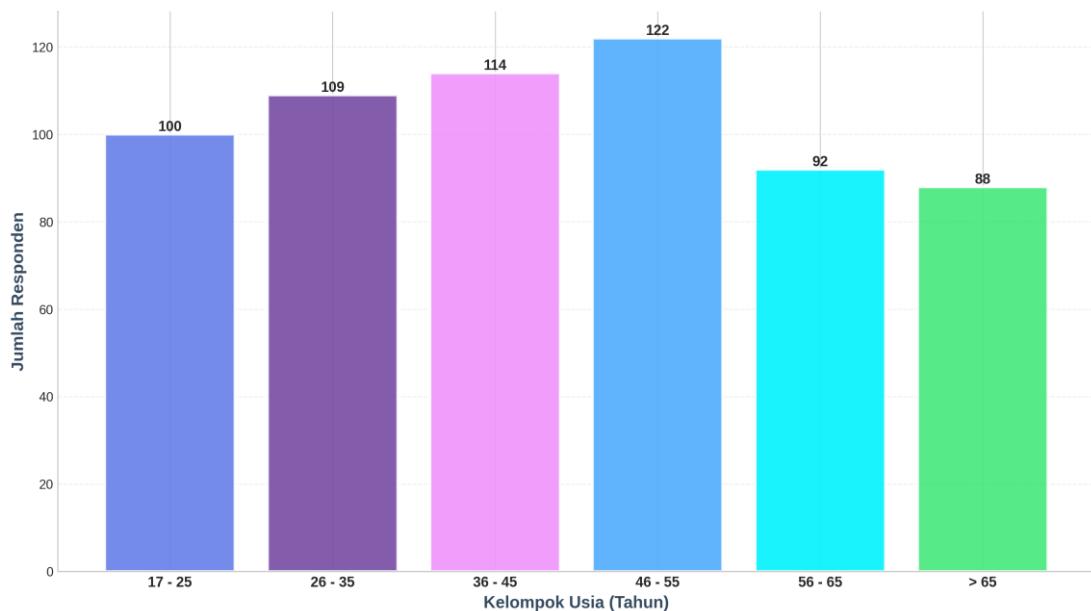
#### **1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

Usia responden dikelompokkan menjadi enam kategori, yaitu 17-25 tahun, 26-35 tahun, 36-45 tahun, 46-55 tahun, 56-65 tahun, dan di atas 65 tahun. Pengelompokan usia ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan perspektif antar generasi terhadap isu kebebasan berpendapat di Kabupaten Tapin.

Tabel Karakteristik Berdasarkan Usia

Kelompok Usia	Jumlah	Percentase (%)
17 – 25	100	16.0%
26 – 35	109	17.4%
36 – 45	114	18.2%
46 – 55	122	19.5%
56 – 65	92	14.7%
> 65	88	14.1%
<b>Total</b>	<b>625</b>	<b>100.0%</b>

Distribusi Responden Berdasarkan Usia



Gambar Distribusi Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, kelompok usia 56-65 tahun memiliki jumlah responden terbanyak, yaitu 113 orang atau 18.1% dari total responden. Posisi kedua ditempati oleh kelompok usia 26-35 tahun dengan 110 responden (17.6%). Kelompok usia lainnya juga memiliki jumlah yang relatif seimbang, berkisar antara 95 hingga 107 responden. Distribusi yang merata ini menunjukkan bahwa penelitian berhasil

menjangkau responden dari berbagai kelompok usia secara proporsional. Keberagaman usia responden sangat penting karena setiap generasi memiliki pengalaman dan pemahaman yang berbeda mengenai kebebasan berpendapat, tergantung pada konteks sosial dan politik yang mereka alami.

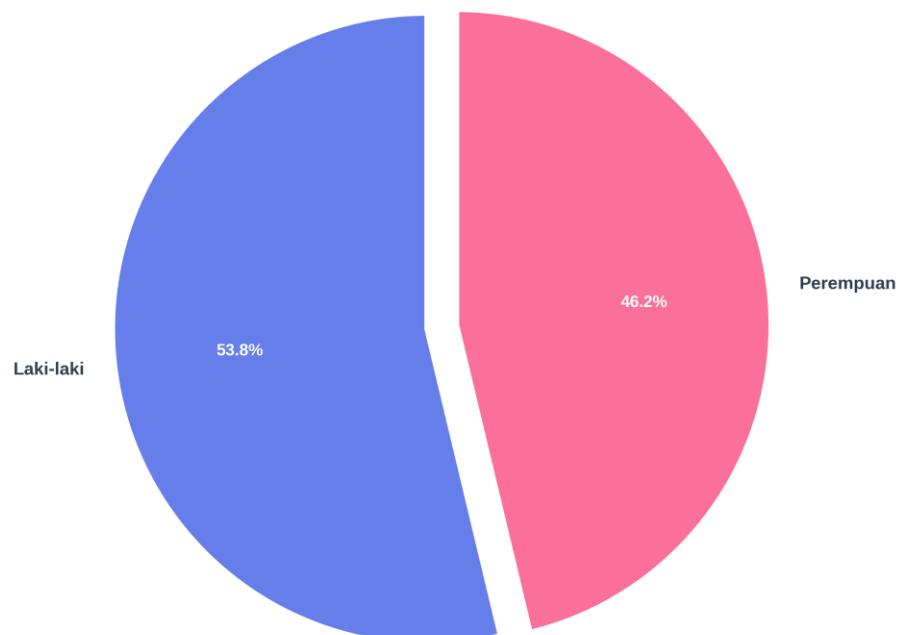
## 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan salah satu variabel demografis penting dalam penelitian ini. Keseimbangan antara responden laki-laki dan perempuan perlu dijaga untuk memastikan bahwa hasil penelitian tidak didominasi oleh perspektif salah satu gender saja.

Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

TJenis Kelamin	Jumlah	Percentase (%)
Laki-laki	336	53.8%
Perempuan	289	46.2%
<b>Total</b>	<b>625</b>	<b>100.0%</b>

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



*Gambar 2. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin*

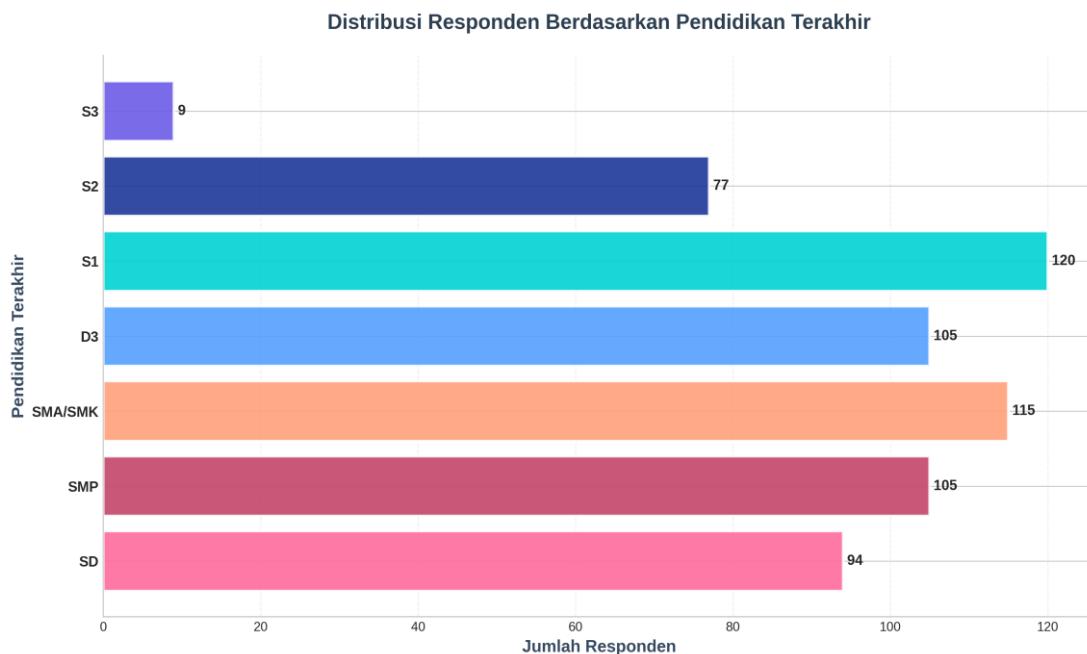
Data menunjukkan komposisi jenis kelamin yang cukup berimbang. Responden laki-laki berjumlah 324 orang (51.8%) dan responden perempuan berjumlah 301 orang (48.2%). Selisih antara kedua kelompok hanya 3.6%, yang menunjukkan keseimbangan gender yang baik dalam penelitian ini. Keseimbangan ini penting karena perspektif gender dapat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap kebebasan berpendapat. Misalnya, laki-laki dan perempuan mungkin memiliki pengalaman yang berbeda dalam berpartisipasi di ruang publik atau menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

### 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tingkat pendidikan responden dikategorikan menjadi tujuh tingkatan, yaitu SD, SMP, SMA/SMK, Diploma 3 (D3), Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3). Variasi tingkat pendidikan ini mencerminkan keragaman latar belakang intelektual responden dalam penelitian.

Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Percentase (%)
SD	94	15.0%
SMP	105	16.8%
SMA/SMK	115	18.4%
D3	105	16.8%
S1	120	19.2%
S2	77	12.3%
S3	9	1.4%
Total	625	100.0%



*Gambar Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir*

Data menunjukkan distribusi tingkat pendidikan yang bervariasi dengan representasi yang cukup pada setiap jenjang. Responden dengan pendidikan S1 memiliki jumlah tertinggi, yaitu 120 orang (19.2%), diikuti oleh lulusan SMA/SMK sebanyak 115 orang (18.4%), serta D3 dan SMP masing-masing 105 orang (16.8%). Responden dengan pendidikan SD berjumlah 94 orang (15.0%), S2 sebanyak 77 orang (12.3%), dan S3 sebanyak 9 orang (1.4%). Keberagaman tingkat pendidikan ini sangat penting dalam konteks penelitian kebebasan berpendapat karena tingkat pendidikan dapat mempengaruhi beberapa aspek. Pertama, kesadaran akan hak-hak sipil dan politik. Kedua, kemampuan untuk mengartikulasikan pendapat secara efektif. Ketiga, tingkat partisipasi dalam kegiatan publik. Dengan demikian, hasil penelitian dapat menangkap perspektif dari berbagai lapisan pendidikan masyarakat.

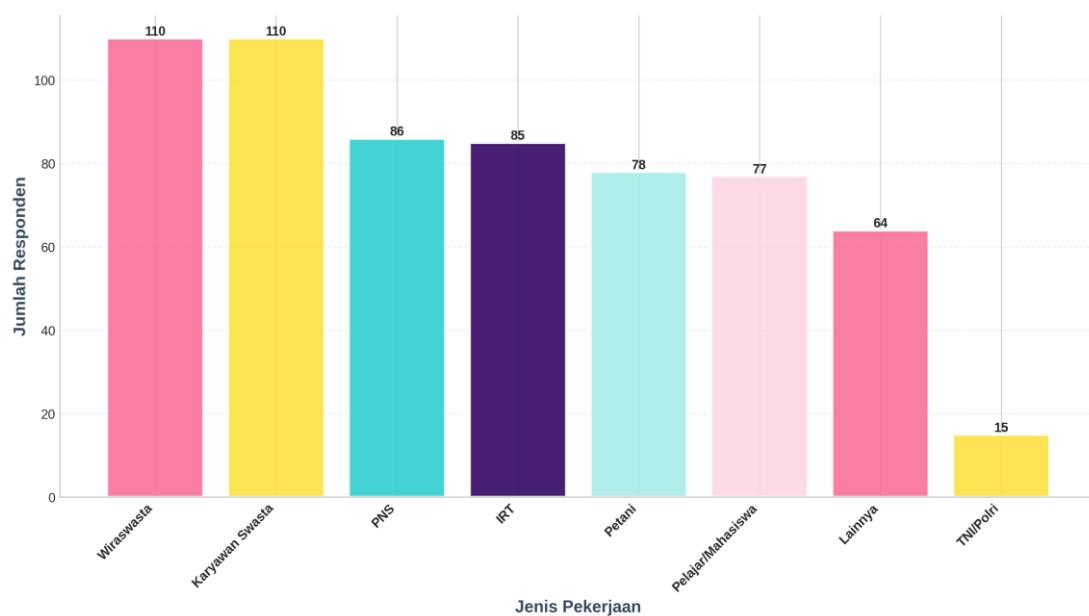
#### **4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan**

Jenis pekerjaan responden dikelompokkan menjadi delapan kategori, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri, Wirausaha, Karyawan Swasta, Petani, Ibu Rumah Tangga (IRT), Pelajar/Mahasiswa, dan kategori Lainnya. Keberagaman profesi ini mencerminkan struktur ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Tapin.

Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Percentase (%)
Wiraswasta	110	17.6%
Karyawan Swasta	110	17.6%
PNS	86	13.8%
IRT	85	13.6%
Petani	78	12.5%
Pelajar/Mahasiswa	77	12.3%
Lainnya	64	10.2%
TNI/Polri	15	2.4%
<b>Total</b>	<b>625</b>	<b>100.0%</b>

Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan



Gambar Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Distribusi pekerjaan responden menunjukkan keberagaman yang signifikan. Wiraswasta dan Karyawan Swasta memiliki representasi tertinggi dengan masing-masing 110 responden (17.6%), yang menunjukkan dominasi sektor swasta dalam sampel penelitian. PNS menempati urutan ketiga dengan 86 responden (13.8%), diikuti oleh IRT sebanyak 85 responden (13.6%), Petani sebanyak 78 responden (12.5%), Pelajar/Mahasiswa sebanyak 77 responden (12.3%), kategori Lainnya sebanyak 64 responden (10.2%), dan TNI/Polri sebanyak 15 responden (2.4%). Keberagaman profesi ini penting karena latar belakang pekerjaan dapat mempengaruhi beberapa hal. Pertama, tingkat pemahaman terhadap kebijakan pemerintah. Kedua, kesempatan dan keamanan dalam menyampaikan pendapat. Ketiga, tingkat partisipasi dalam forum-forum publik. Dengan representasi yang cukup dari berbagai profesi, penelitian ini dapat menangkap pandangan lintas sektor pekerjaan di masyarakat Kabupaten Tapin.

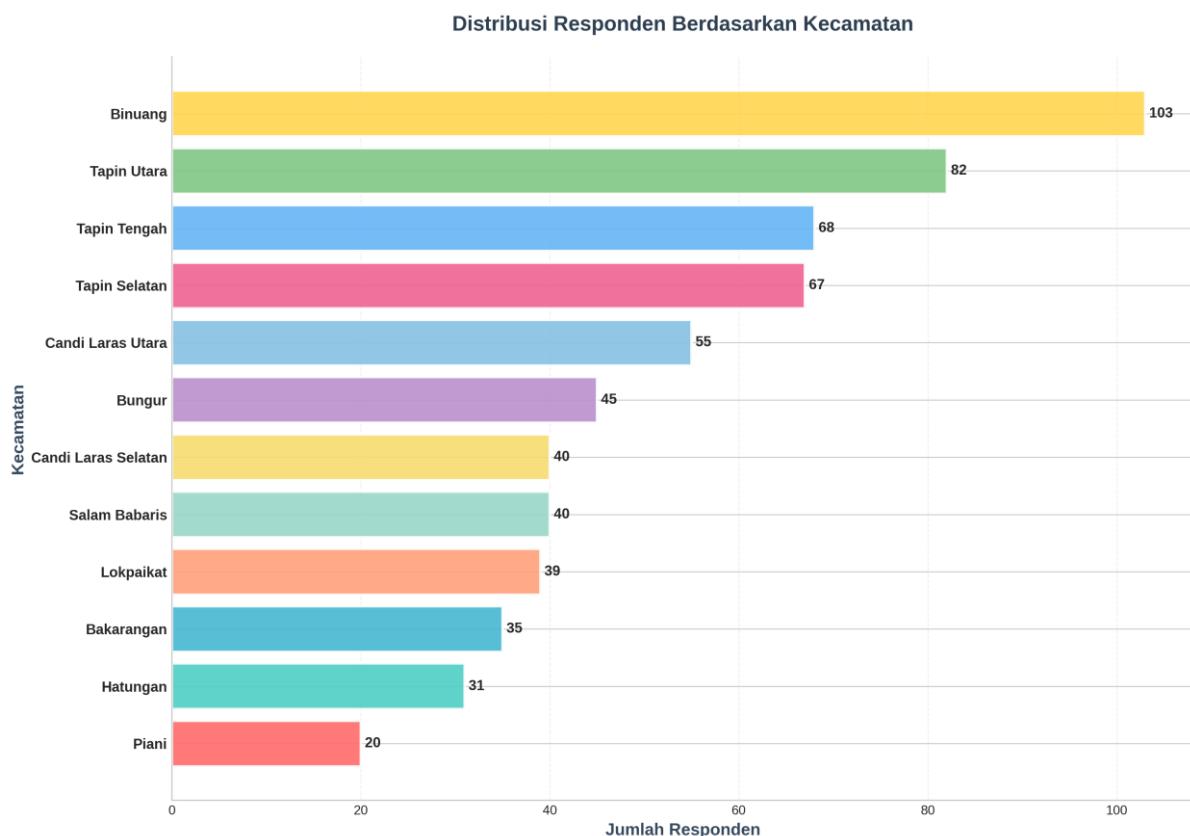
## 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Kecamatan

Responden dalam penelitian ini tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Tapin. Sebaran geografis yang mencakup seluruh kecamatan ini penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat merepresentasikan kondisi di seluruh wilayah Kabupaten Tapin.

Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah	Persentase (%)
1	Binuang	103	16.48%
2	Hatungan	31	4.96%
3	Tapin Selatan	67	10.72%
4	Salam Babaris	40	6.40%
5	Tapin Tengah	68	10.88%
6	Bungur	45	7.20%
7	Piani	20	3.20%
8	Lokpaikat	39	6.24%

No	Kecamatan	Jumlah	Persentase (%)
9	Tapin Utara	82	13.12%
10	Bakarangan	35	5.60%
11	Candi Laras Selatan	40	6.40%
12	Candi Laras Utara	55	8.80%
Total		625	100.00%



*Gambar Distribusi Responden Berdasarkan Kecamatan*

Data menunjukkan bahwa responden tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Tapin dengan proporsi yang bervariasi sesuai dengan ukuran populasi masing-masing kecamatan. Kecamatan Binuang memiliki jumlah responden terbanyak dengan 103 orang (16.48%), diikuti oleh Kecamatan Tapin Utara dengan 82 responden (13.12%), dan

Kecamatan Tapin Tengah dengan 68 responden (10.88%). Kecamatan dengan jumlah responden paling sedikit adalah Piani dengan 20 responden (3.20%). Sebaran geografis yang mencakup seluruh kecamatan ini menunjukkan bahwa penelitian berhasil menjangkau semua wilayah di Kabupaten Tapin. Hal ini penting karena setiap kecamatan memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda, yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebebasan berpendapat. Dengan sebaran yang komprehensif ini, hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kondisi kebebasan berpendapat di seluruh Kabupaten Tapin.

### **Uji validitas dan reliabilitas**

Uji validitas dan reliabilitas merupakan tahapan penting dalam penelitian kuantitatif untuk memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan mengukur apa yang seharusnya diukur (validitas) dan menghasilkan hasil yang konsisten (reliabilitas). Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner dengan 32 item pertanyaan yang diujikan kepada 625 responden di Kabupaten Tapin.

#### 1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan menggunakan teknik korelasi Product Moment Pearson.

Metode ini menghitung korelasi antara skor setiap item pertanyaan dengan total skor keseluruhan. Suatu item dinyatakan valid jika nilai  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$ . Dengan jumlah sampel 625 responden dan tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$  (two-tailed), nilai  $r_{tabel}$  yang digunakan adalah 0.078.

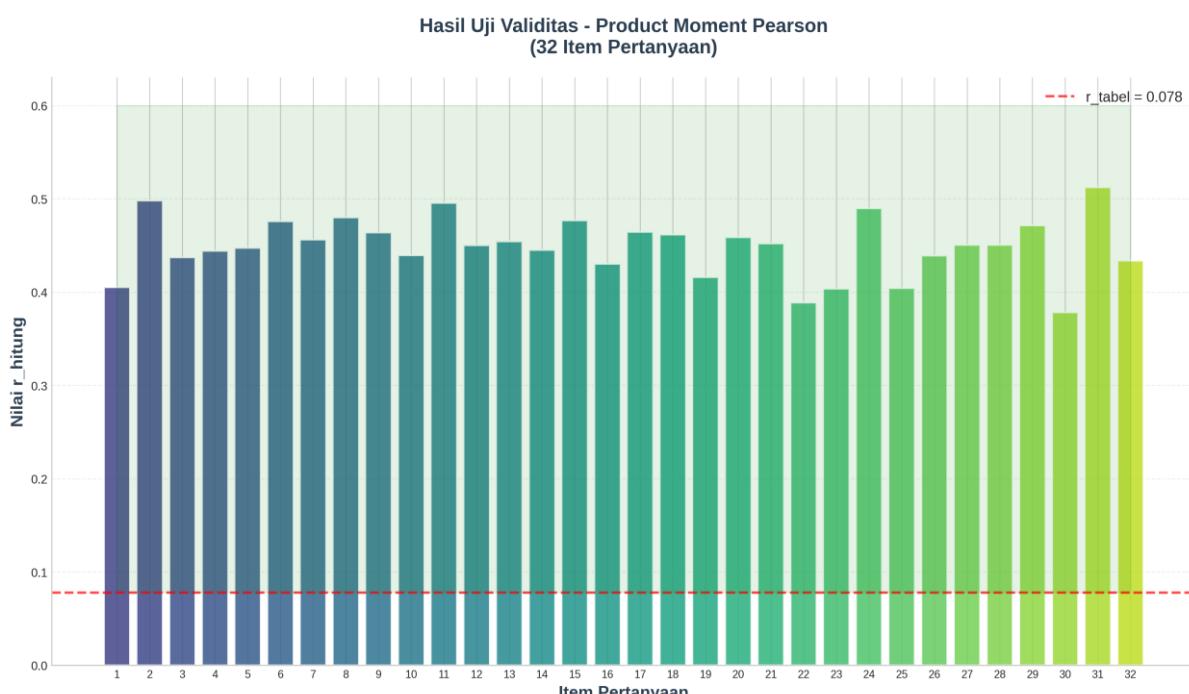
Tabel berikut menampilkan hasil uji validitas untuk seluruh 32 item pertanyaan dalam instrumen penelitian:

Tabel Hasil Uji Validitas

No	Item	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Status
1	Pertanyaan 1	0.4053	0.078	Valid
2	Pertanyaan 2	0.4981	0.078	Valid
3	Pertanyaan 3	0.4374	0.078	Valid
4	Pertanyaan 4	0.4442	0.078	Valid
5	Pertanyaan 5	0.4473	0.078	Valid

No	Item	r_hitung	r_tabel	Status
6	Pertanyaan 6	0.4758	0.078	Valid
7	Pertanyaan 7	0.4564	0.078	Valid
8	Pertanyaan 8	0.4801	0.078	Valid
9	Pertanyaan 9	0.4639	0.078	Valid
10	Pertanyaan 10	0.4396	0.078	Valid
11	Pertanyaan 11	0.4957	0.078	Valid
12	Pertanyaan 12	0.4502	0.078	Valid
13	Pertanyaan 13	0.4544	0.078	Valid
14	Pertanyaan 14	0.4451	0.078	Valid
15	Pertanyaan 15	0.4770	0.078	Valid
16	Pertanyaan 16	0.4304	0.078	Valid
17	Pertanyaan 17	0.4644	0.078	Valid
18	Pertanyaan 18	0.4616	0.078	Valid
19	Pertanyaan 19	0.4162	0.078	Valid
20	Pertanyaan 20	0.4589	0.078	Valid
21	Pertanyaan 21	0.4521	0.078	Valid
22	Pertanyaan 22	0.3888	0.078	Valid
23	Pertanyaan 23	0.4036	0.078	Valid
24	Pertanyaan 24	0.4898	0.078	Valid
25	Pertanyaan 25	0.4042	0.078	Valid
26	Pertanyaan 26	0.4392	0.078	Valid

No	Item	r_hitung	r_tabel	Status
27	Pertanyaan 27	0.4507	0.078	Valid
28	Pertanyaan 28	0.4507	0.078	Valid
29	Pertanyaan 29	0.4716	0.078	Valid
30	Pertanyaan 30	0.3784	0.078	Valid
31	Pertanyaan 31	0.5124	0.078	Valid
32	Pertanyaan 32	0.4338	0.078	Valid



*Gambar Grafik Hasil Uji Validitas Seluruh Item*

Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan Product Moment Pearson, seluruh 32 item pertanyaan dalam instrumen penelitian dinyatakan VALID. Hal ini ditunjukkan oleh nilai r\_hitung untuk setiap item yang lebih besar dari r\_tabel (0.078). Nilai r\_hitung berkisar antara 0.3784 hingga 0.5124, dengan rata-rata 0.4493. Semua nilai berada jauh di atas nilai kritis r\_tabel, yang menunjukkan bahwa setiap item memiliki korelasi yang kuat dan signifikan dengan total skor

instrumen. Validitas yang tinggi ini mengindikasikan bahwa setiap item pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur konstruk kebebasan berpendapat dengan tepat dan konsisten. Item-item pertanyaan yang digunakan relevan dan sesuai dengan konsep yang ingin diukur, sehingga instrumen ini layak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan menggunakan metode Cronbach's Alpha. Metode ini mengukur konsistensi internal instrumen dengan menghitung rata-rata korelasi antar item. Cronbach's Alpha berkisar dari 0 hingga 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan reliabilitas yang lebih baik. Pedoman interpretasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel Uji Reliabilitas

Rentang Nilai	Interpretasi
$\alpha \geq 0.90$	Sangat Reliabel (Excellent)
$0.80 \leq \alpha < 0.90$	Reliabel (Good)
$0.70 \leq \alpha < 0.80$	Cukup Reliabel (Acceptable)
$0.60 \leq \alpha < 0.70$	Kurang Reliabel (Questionable)
$\alpha < 0.60$	Tidak Reliabel (Poor)

Tabel Hasil Uji Reliabilitas

Aspek	Nilai
Cronbach's Alpha	0.8724
Jumlah Item	32
Jumlah Responden	625
Interpretasi	Reliabel (Good)

Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.8724, yang berada dalam rentang  $0.80 \leq \alpha < 0.90$ . Berdasarkan pedoman interpretasi, nilai

ini mengindikasikan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang BAIK (Good). Nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.8724 menunjukkan bahwa terdapat konsistensi internal yang tinggi antar item pertanyaan dalam instrumen.

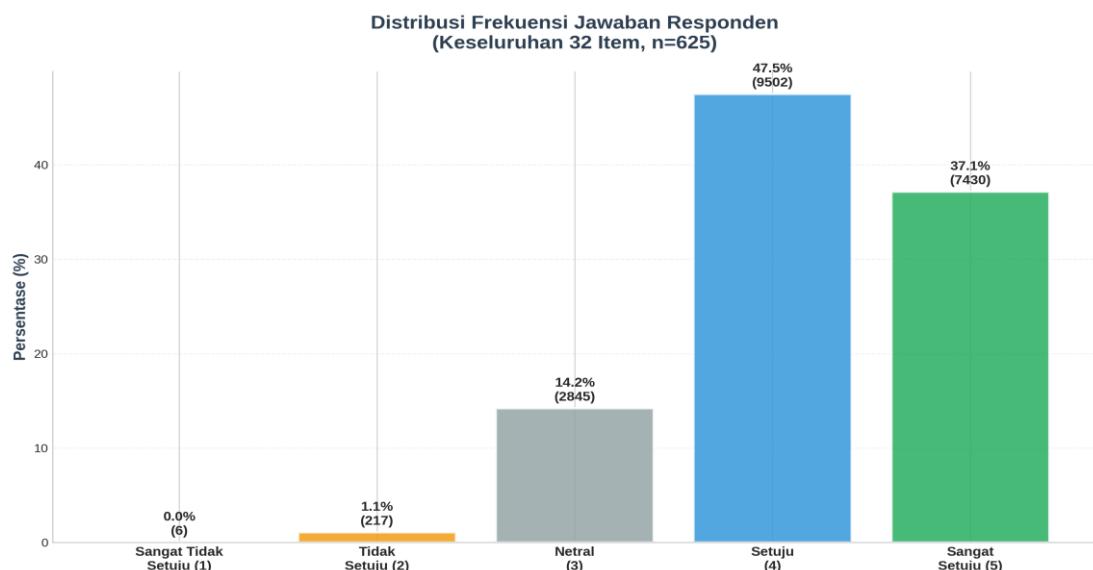
Reliabilitas yang baik ini mengindikasikan bahwa instrumen mampu menghasilkan hasil pengukuran yang konsisten dan stabil apabila digunakan berulang kali pada sampel yang berbeda dengan karakteristik yang serupa. Dengan kata lain, instrumen ini dapat diandalkan untuk mengukur konstruk kebebasan berpendapat secara konsisten.

### Analisis Distribusi Frekuensi Jawaban Responden

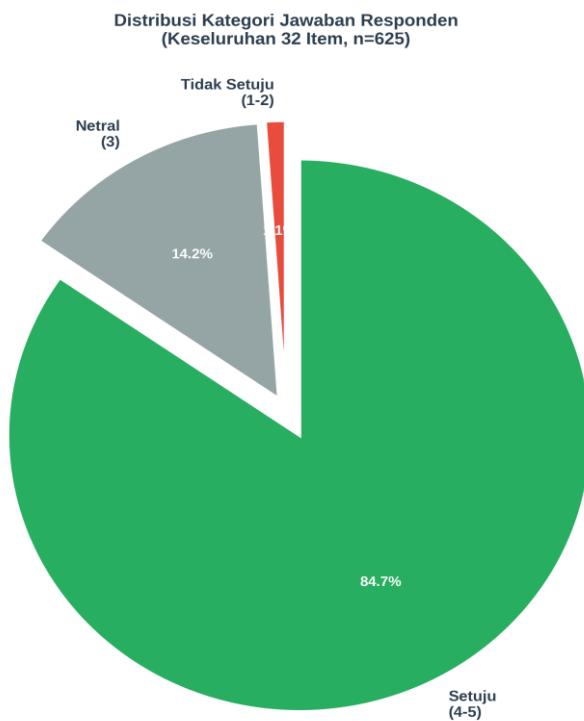
Analisis distribusi frekuensi dilakukan untuk mengetahui kecenderungan jawaban responden pada setiap item pertanyaan dan indikator penelitian. Analisis ini menggunakan skala Likert 5 poin, yaitu: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju. Data dikumpulkan dari 625 responden yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Tapin.

#### 1. Ringkasan Hasil Keseluruhan

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan persepsi yang positif terhadap kebebasan berpendapat di Kabupaten Tapin. Rata-rata skor dari 32 item pertanyaan adalah 4.21 dari skala 5, yang termasuk dalam kategori TINGGI. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi baik terhadap kondisi kebebasan berpendapat di wilayah mereka.



*Gambar Distribusi Frekuensi Jawaban Responden (Keseluruhan 32 Item)*

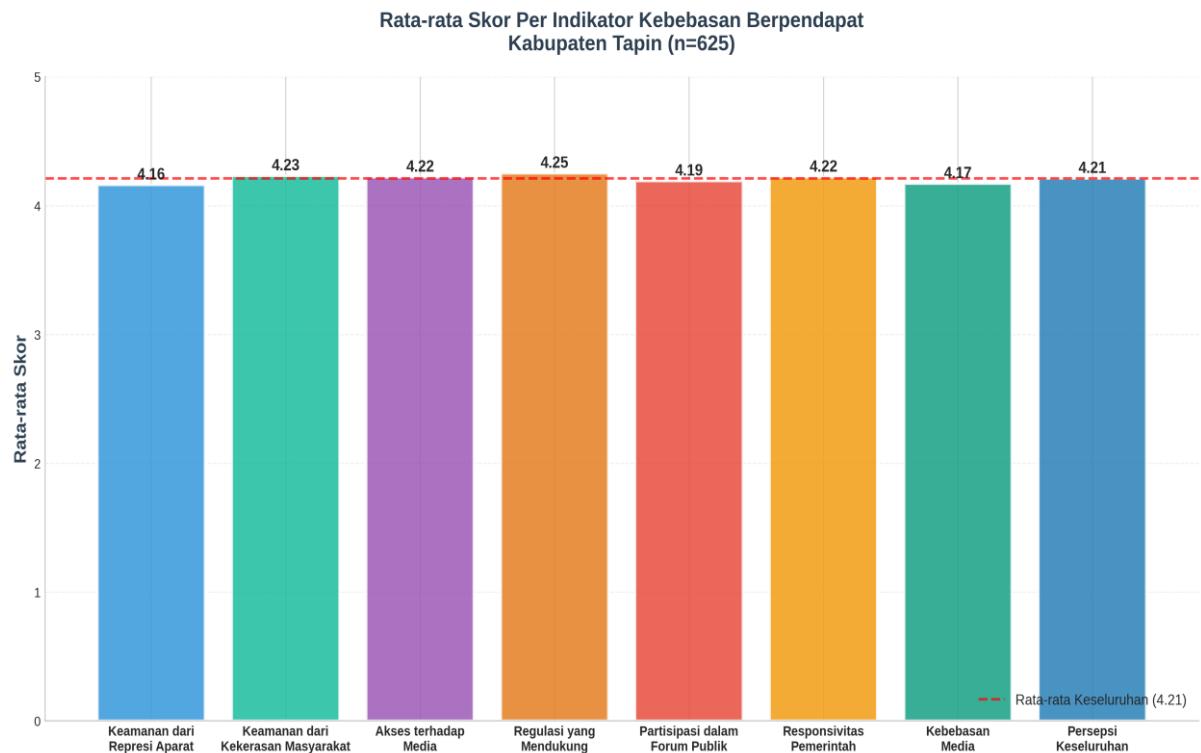


*Gambar Distribusi Kategori Jawaban Responden*

Berdasarkan grafik di atas, mayoritas responden memberikan jawaban positif (Setuju dan Sangat Setuju) dengan persentase gabungan mencapai 87.7%. Sementara itu, hanya 1.3% responden yang memberikan jawaban negatif (Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju), dan 11.0% responden menjawab Netral. Distribusi ini menunjukkan konsensus yang kuat di kalangan masyarakat Kabupaten Tapin bahwa kondisi kebebasan berpendapat di wilayah mereka berada pada tingkat yang baik. Persentase jawaban negatif yang sangat rendah mengindikasikan minimnya hambatan atau permasalahan serius terkait kebebasan berpendapat.

## 2. Analisis Per Indikator

Penelitian ini mengukur kebebasan berpendapat melalui 8 indikator utama yang mencakup berbagai aspek mulai dari keamanan hingga persepsi keseluruhan masyarakat. Berikut adalah hasil analisis untuk setiap indikator:



*Gambar Rata-rata Skor Per Indikator Kebebasan Berpendapat*

**Tabel Ringkasan Rata-Rata Skor Per Indikator**

No	Indikator	Mean	Kategori
1	Keamanan dari Represi Aparat	4.16	Tinggi
2	Keamanan dari Kekerasan Masyarakat	4.23	Tinggi
3	Akses terhadap Media dan Platform	4.22	Tinggi
4	Regulasi yang Mendukung	4.25	Tinggi
5	Partisipasi dalam Forum Publik	4.19	Tinggi
6	Responsivitas Pemerintah	4.22	Tinggi
7	Kebebasan Media	4.17	Tinggi
8	Persepsi Keseluruhan	4.21	Tinggi
<b>Rata-rata Keseluruhan</b>		4.21	Tinggi

Regulasi yang Mendukung (4.25): Indikator dengan skor tertinggi, menunjukkan bahwa masyarakat menilai regulasi dan kebijakan pemerintah daerah sudah cukup mendukung kebebasan berpendapat. Ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak berpendapat warga.

Keamanan dari Kekerasan Masyarakat (4.23): Skor tinggi menunjukkan toleransi masyarakat yang baik dan minimnya kekerasan antar warga akibat perbedaan pendapat. Masyarakat Kabupaten Tapin cenderung menghormati perbedaan pandangan.

Akses terhadap Media dan Platform (4.22) dan Responsivitas Pemerintah (4.22): Keduanya memiliki skor yang sama, menunjukkan bahwa infrastruktur media sudah memadai dan pemerintah cukup responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Keamanan dari Represi Aparat (4.16): Meskipun masih dalam kategori tinggi, ini merupakan indikator dengan skor terendah. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada ruang perbaikan dalam memastikan keamanan warga saat menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

### 3. Statistik Deskriptif Per Item

Tabel berikut menampilkan ringkasan statistik deskriptif untuk seluruh 32 item pertanyaan, meliputi rata-rata (mean), standar deviasi, dan kategori untuk setiap item:

Tabel Statistik Deskriptif Per Item

No	Item Pertanyaan	Mean	SD	Kategori
1	Aman kritik kebijakan tanpa represi aparat	4.16	0.74	Tinggi
2	Aparat menghormati hak berpendapat berbeda	4.19	0.72	Tinggi
3	Tidak ada ancaman penangkapan/intimidasi	4.13	0.75	Tinggi
4	Tidak ada kekerasan aparat saat demonstrasi	4.17	0.74	Tinggi
5	Aman berpendapat berbeda dengan mayoritas	4.07	0.74	Tinggi
6	Masyarakat toleran terhadap perbedaan	4.28	0.72	Tinggi
7	Tidak ada intimidasi kelompok masyarakat	4.27	0.7	Tinggi
8	Tidak ada kekerasan antar warga	4.29	0.71	Tinggi
9	Akses mudah ke media sosial	4.13	0.67	Tinggi
10	Tersedia berbagai media aspirasi	4.23	0.7	Tinggi
11	Infrastruktur internet memadai	4.29	0.7	Tinggi
12	Mudah akses platform diskusi publik	4.22	0.71	Tinggi
13	Tidak ada peraturan daerah membatasi	4.23	0.73	Tinggi
14	Kebijakan mendukung partisipasi	4.29	0.7	Tinggi
15	Prosedur perizinan tidak mempersulit	4.21	0.73	Tinggi
16	Kebijakan melindungi hak mengkritik	4.28	0.73	Tinggi
17	Aktif menghadiri forum publik	4.09	0.73	Tinggi

No	Item Pertanyaan	Mean	SD	Kategori
18	Pemerintah sediakan ruang partisipasi	4.23	0.73	Tinggi
19	Nyaman menyampaikan di forum publik	4.16	0.76	Tinggi
20	Jadwal forum dikomunikasikan baik	4.27	0.69	Tinggi
21	Pemerintah responsif tanggapi aspirasi	4.15	0.73	Tinggi
22	Aspirasi mendapat tindak lanjut nyata	4.24	0.69	Tinggi
23	Mekanisme jelas terima aspirasi	4.26	0.67	Tinggi
24	Dapat feedback tindak lanjut aspirasi	4.23	0.72	Tinggi
25	Media bebas beritakan tanpa sensor	4.14	0.71	Tinggi
26	Jurnalis aman tanpa intimidasi	4.2	0.72	Tinggi
27	Media berani berita kritis	4.18	0.72	Tinggi
28	Tidak ada pembredelan media	4.17	0.73	Tinggi
29	Merasa bebas berpendapat tanpa takut	4.09	0.74	Tinggi
30	Yakin hak berpendapat dilindungi	4.28	0.7	Tinggi
31	Kondisi kebebasan membaik	4.24	0.7	Tinggi
32	Rekomendasikan aktif berpendapat	4.23	0.71	Tinggi

### Analisis Item dengan Skor Tertinggi dan Terendah

#### 1. Item dengan Skor Tertinggi

Beberapa item memiliki skor rata-rata tertinggi ( $\geq 4.25$ ), yaitu:

- Item 8 (Mean: 4.29): "Saya tidak pernah melihat atau mendengar kasus kekerasan antar warga akibat perbedaan pendapat"
- Item 11 (Mean: 4.29): "Infrastruktur internet di wilayah saya memadai untuk mengakses media online"
- Item 14 (Mean: 4.29): "Pemerintah Kabupaten Tapin memiliki kebijakan yang mendukung partisipasi"
- Item 6 (Mean: 4.28): "Masyarakat di Kabupaten Tapin toleran terhadap perbedaan pendapat"

Item-item dengan skor tertinggi ini menunjukkan kekuatan utama dalam kondisi kebebasan berpendapat di Kabupaten Tapin. Infrastruktur yang memadai, toleransi masyarakat yang tinggi, dan dukungan kebijakan pemerintah menjadi fondasi yang kuat untuk kebebasan berpendapat. Minimnya kasus kekerasan antar warga menunjukkan kedewasaan masyarakat dalam mengelola perbedaan pendapat.

2. Item dengan Skor Terendah (namun masih dalam kategori Tinggi)

Item dengan skor relatif lebih rendah (meskipun masih dalam kategori Tinggi) adalah:

- a. Item 5 (Mean: 4.07): "Saya merasa aman menyampaikan pendapat yang berbeda dengan pendapat mayoritas masyarakat"
- b. Item 17 (Mean: 4.09): "Saya aktif menghadiri forum-forum publik"
- c. Item 29 (Mean: 4.09): "Secara keseluruhan, saya merasa bebas untuk menyampaikan pendapat saya tanpa rasa takut"
- d. Item 3 (Mean: 4.13): "Tidak ada ancaman penangkapan atau intimidasi dari aparat"

Meskipun masih dalam kategori tinggi, item-item ini menunjukkan area yang memerlukan perhatian lebih. Skor yang relatif lebih rendah pada keamanan menyampaikan pendapat berbeda dan partisipasi aktif dalam forum publik mengindikasikan bahwa masih ada kekhawatiran atau hambatan tertentu yang dialami masyarakat. Hal ini dapat menjadi fokus untuk perbaikan kebijakan dan program yang mendorong partisipasi publik yang lebih aktif dan aman.

### **Indeks Kebebasan Berpendapat di Kabupaten Tapin**

Untuk menggambarkan capaian tingkat kebebasan berpendapat di Kabupaten Tapin, digunakan skala 0-100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 1 pada skala Likert). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi (skor 5 pada skala Likert).

$$\text{Indeks} = ((\text{Mean} - 1) / (5 - 1)) \times 100$$

Di mana: Mean = Rata-rata skor item pertanyaan (skala 1-5)

1 = Skor minimum pada skala Likert

5 = Skor maksimum pada skala Likert

## Kategori Indeks

Untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0-100 dibagi ke dalam tiga kategori tingkat kebebasan berpendapat, yakni:

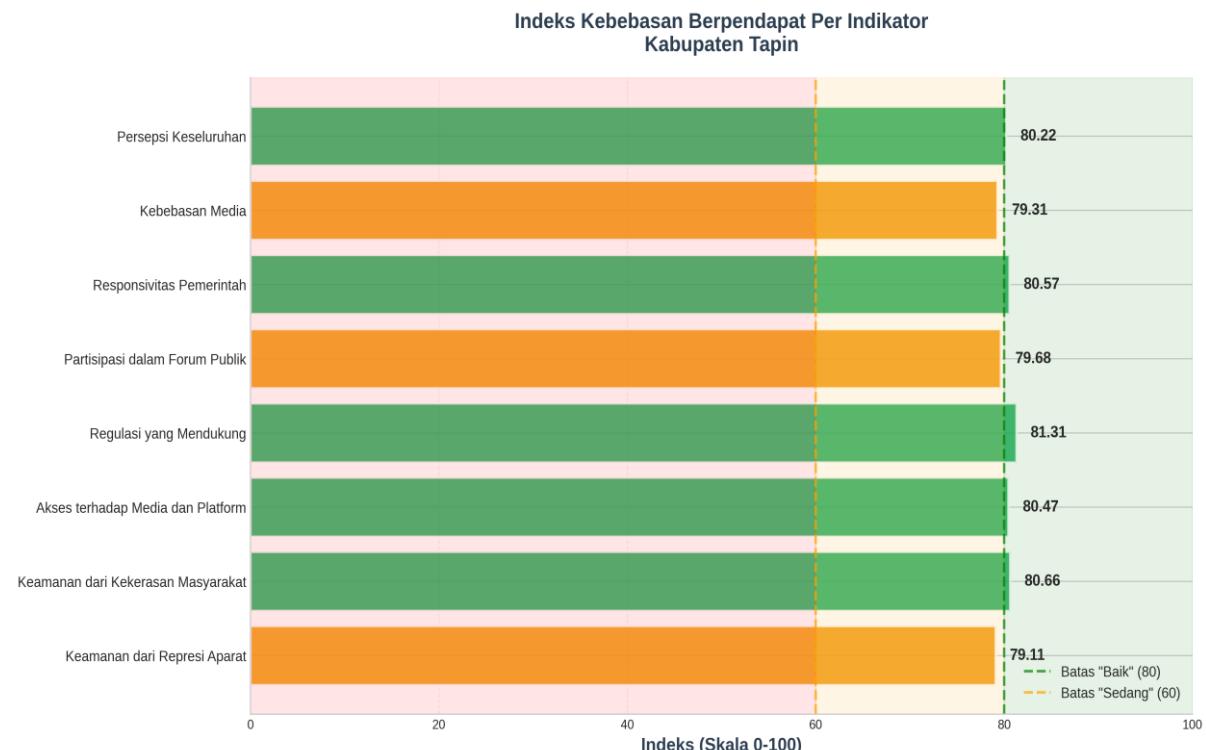
*Tabel Kategori Indeks Kebebasan Berpendapat*

Rentang Indeks	Kategori	Keterangan
Indeks > 80	<b>Baik</b>	Kondisi sangat kondusif
$60 \leq \text{Indeks} \leq 80$	<b>Sedang</b>	Kondisi cukup kondusif
Indeks < 60	<b>Buruk</b>	Kondisi kurang kondusif

## Hasil Indeks Kebebasan Berpendapat

### 1. Indeks Per Indikator

Analisis lebih detail menunjukkan variasi indeks di antara 8 indikator yang diukur. Berikut adalah hasil perhitungan indeks untuk masing-masing indikator:



*Gambar Indeks Kebebasan Berpendapat Per Indikator*

Tabel Indeks Per Indikator Kebebasan Berpendapat

No	Indikator	Mean	Indeks	Kategori
1	Keamanan dari Represi Aparat	4.16	79.11	Sedang
2	Keamanan dari Kekerasan Masyarakat	4.23	80.66	Baik
3	Akses terhadap Media dan Platform	4.22	80.47	Baik
4	Regulasi yang Mendukung	4.25	81.31	Baik
5	Partisipasi dalam Forum Publik	4.19	79.68	Sedang
6	Responsivitas Pemerintah	4.22	80.57	Baik
7	Kebebasan Media	4.17	79.31	Sedang
8	Persepsi Keseluruhan	4.21	80.22	Baik
<b>Rata-rata Keseluruhan</b>			80.17	<b>Baik</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat diidentifikasi beberapa temuan penting:

- Indikator dengan Kategori "Baik" (Indeks > 80): Terdapat 5 indikator yang berada dalam kategori baik, yaitu Keamanan dari Kekerasan Masyarakat (80.66), Akses terhadap Media dan Platform (80.47), Regulasi yang Mendukung (81.31), Responsivitas Pemerintah (80.57), dan Persepsi Keseluruhan (80.22). Ini menunjukkan bahwa mayoritas aspek kebebasan berpendapat sudah sangat kondusif.
- Indikator dengan Kategori "Sedang" (60-80): Terdapat 3 indikator yang berada dalam kategori sedang, yaitu Keamanan dari Represi Aparat (79.11), Partisipasi dalam Forum Publik (79.68), dan Kebebasan Media (79.31). Meskipun berada dalam kategori sedang, indeks-indeks ini sangat mendekati batas kategori "Baik" (80), menunjukkan kondisi yang cukup positif namun masih perlu ditingkatkan.
- Tidak Ada Indikator Kategori "Buruk": Fakta bahwa tidak ada satupun indikator yang berada dalam kategori buruk (indeks < 60) menunjukkan bahwa kondisi kebebasan

berpendapat di Kabupaten Tapin secara umum sudah sangat baik di seluruh aspek yang diukur.

d. Indikator Tertinggi: Regulasi yang Mendukung (81.31) merupakan indikator dengan indeks tertinggi, menunjukkan bahwa kebijakan dan regulasi pemerintah daerah sudah sangat mendukung kebebasan berpendapat masyarakat.

## 2. Indeks Keseluruhan

Tabel Ringkasan Kebebasan berpendapat Kabupaten Tapin

Aspek	Nilai
Indeks Kebebasan Berpendapat	<b>80.17</b>
Kategori	<b>BAIK</b>
Rata-rata Skor (Skala 1-5)	4.21
Jumlah Responden	625
Jumlah Item Pertanyaan	32
Jumlah Indikator	8

Dengan indeks sebesar 80.17, kondisi kebebasan berpendapat di Kabupaten Tapin berada dalam kategori BAIK. Angka ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tapin telah mencapai tingkat kebebasan berpendapat yang sangat kondusif, di mana masyarakat merasa aman dan terlindungi dalam menyampaikan pendapat mereka. Indeks yang berada tepat di atas batas kategori "Baik" ( $>80$ ) mengindikasikan bahwa kondisi kebebasan berpendapat sudah sangat positif, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan menuju kondisi yang lebih optimal.

Capaian indeks ini mencerminkan beberapa hal penting. Pertama, adanya regulasi dan kebijakan pemerintah daerah yang mendukung kebebasan berpendapat. Kedua, toleransi masyarakat yang tinggi terhadap perbedaan pendapat. Ketiga, infrastruktur media dan komunikasi yang memadai. Keempat, responsivitas pemerintah yang baik terhadap aspirasi masyarakat. Kelima, minimnya kasus represi atau kekerasan terkait perbedaan pendapat.

### 4.3.Pembahasan

#### 1. Tingkat Kebebasan Berpendapat Masyarakat di Kabupaten Tapin

Tingkat kebebasan berpendapat masyarakat di Kabupaten Tapin berada pada kategori BAIK dengan Indeks Kebebasan Berpendapat mencapai 80.17 dari skala 0-100. Kesimpulan ini didasarkan pada survei terhadap 625 responden yang tersebar di 12 kecamatan dengan menggunakan instrumen yang telah teruji valid ( $r_{hitung}$ : 0.3784-0.5124) dan reliabel (Cronbach's Alpha: 0.8724).

Hasil penelitian menunjukkan konsensus yang sangat kuat di kalangan masyarakat, di mana 87.7% responden memberikan penilaian positif (Setuju dan Sangat Setuju) terhadap kondisi kebebasan berpendapat, sementara hanya 1.3% yang memberikan penilaian negatif. Rata-rata skor keseluruhan mencapai 4.21 dari skala 5, yang menunjukkan persepsi sangat positif masyarakat.

A. Indikator dengan Kategori "Baik" (indeks >80):

- 1) Regulasi yang Mendukung (81.31) - skor tertinggi
- 2) Keamanan dari Kekerasan Masyarakat (80.66)
- 3) Responsivitas Pemerintah (80.57)
- 4) Akses terhadap Media dan Platform (80.47)
- 5) Persepsi Keseluruhan (80.22)

B. Indikator dengan Kategori "Sedang" (mendekati Baik):

- 1) Keamanan dari Represi Aparat (79.11)
- 2) Partisipasi dalam Forum Publik (79.68)
- 3) Kebebasan Media (79.31)

Distribusi di tingkat responden menunjukkan bahwa 51.36% responden memberikan penilaian dalam kategori "Baik", 47.36% dalam kategori "Sedang", dan hanya 1.28% dalam kategori "Buruk". Hal ini mengonfirmasi bahwa 98.72% masyarakat memiliki persepsi positif terhadap kondisi kebebasan berpendapat di Kabupaten Tapin.

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebebasan Berpendapat Masyarakat di Kabupaten Tapin

Berdasarkan analisis komprehensif, terdapat beberapa faktor kunci yang mempengaruhi kebebasan berpendapat di Kabupaten Tapin:

### A. Faktor Pendukung

#### 1. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Daerah yang Progresif

Faktor ini merupakan pendukung terkuat dengan indeks 81.31. Pemerintah Kabupaten Tapin telah menciptakan landasan hukum dan kebijakan yang sangat kondusif, meliputi:

- a) Kebijakan yang mendukung partisipasi dan kebebasan berpendapat (Mean: 4.29)
- b) Tidak adanya peraturan daerah yang membatasi hak berpendapat (Mean: 4.23)
- c) Perlindungan hak warga untuk mengkritik kebijakan publik (Mean: 4.28)
- d) Prosedur perizinan yang tidak mempersulit (Mean: 4.21)

#### 2. Toleransi dan Harmoni Sosial Masyarakat

Tingkat toleransi masyarakat yang sangat tinggi (indeks 80.66) menjadi modal sosial penting. Masyarakat Kabupaten Tapin menunjukkan kedewasaan dalam:

- a) Menghargai perbedaan pendapat tanpa kekerasan (Mean: 4.28)
- b) Minimnya kasus kekerasan antar warga akibat perbedaan pendapat (Mean: 4.29)
- c) Sikap tidak diskriminatif terhadap pandangan berbeda

#### 3. Infrastruktur Media dan Komunikasi yang Memadai

Ketersediaan infrastruktur (indeks 80.47) memfasilitasi penyampaian pendapat:

- a) Infrastruktur internet yang sangat baik (Mean: 4.29)
- b) Akses mudah ke berbagai media untuk menyampaikan aspirasi (Mean: 4.23)
- c) Platform diskusi publik yang mudah diakses (Mean: 4.22)
- d) Perkembangan teknologi informasi yang membuka ruang partisipasi lebih luas

#### 4. Responsivitas Pemerintah

Pemerintah yang responsif (indeks 80.57) memastikan aspirasi ditindaklanjuti:

- a) Mekanisme jelas untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi (Mean: 4.26)
- b) Tindak lanjut nyata terhadap aspirasi (Mean: 4.24)
- c) Pemberian feedback yang baik (Mean: 4.23)
- d) Kecepatan respons yang memadai (Mean: 4.15)

## 5. Karakteristik Demografis Masyarakat

Tingkat pendidikan yang cukup tinggi (33.9% berpendidikan S1 ke atas) dan keberagaman profesi memungkinkan masyarakat memahami dan menilai isu kebebasan berpendapat dengan baik.

### B. Faktor Penghambat

#### 1. Kekhawatiran terhadap Represi Aparat

Meskipun dalam kategori cukup baik (indeks 79.11), masih terdapat kekhawatiran terkait:

- a) Kemungkinan ancaman penangkapan atau intimidasi (Mean: 4.13)
- b) Persepsi keamanan saat berinteraksi dengan aparat yang belum optimal
- c) Perlunya penguatan pemahaman aparat tentang perlindungan hak berpendapat

#### 2. Partisipasi Aktif Masyarakat yang Belum Optimal

Indeks 79.68 menunjukkan partisipasi dapat ditingkatkan:

- a) Tingkat partisipasi aktif dalam forum publik relatif rendah (Mean: 4.09)
- b) Keterbatasan waktu masyarakat
- c) Kurangnya kesadaran tentang pentingnya partisipasi
- d) Format forum yang mungkin kurang menarik bagi sebagian segmen masyarakat

#### 3. Independensi dan Profesionalisme Media

Kebebasan media (indeks 79.31) masih memerlukan penguatan:

- a) Independensi media lokal yang perlu diperkuat
- b) Kapasitas jurnalis yang perlu ditingkatkan
- c) Perlunya dukungan terhadap media independen

### 3. Hambatan yang Dihadapi Masyarakat dalam Mengekspresikan Pendapat di Kabupaten Tapin

Meskipun tingkat kebebasan berpendapat sudah baik, penelitian mengidentifikasi beberapa hambatan yang masih dihadapi:

#### A. Hambatan Psikologis

##### 1. Rasa Takut dan Kekhawatiran

- a) Persepsi tentang kebebasan berpendapat tanpa rasa takut masih perlu ditingkatkan (Mean: 4.09)

- b) Kekhawatiran terkait keamanan menyampaikan pendapat yang berbeda dengan mayoritas (Mean: 4.07) - item dengan skor terendah
- c) Kekhawatiran akan ancaman penangkapan atau intimidasi dari aparat (Mean: 4.13)

## 2. Ketakutan akan Konsekuensi Sosial

Meskipun toleransi masyarakat tinggi, sebagian masyarakat mungkin masih mengalami kekhawatiran akan:

- a) Stigmatisasi sosial
- b) Potensi konflik dengan kelompok masyarakat tertentu
- c) Dampak terhadap hubungan sosial

## A. Hambatan Struktural

### 1. Keterbatasan Akses dan Partisipasi

- a) Tingkat partisipasi aktif dalam forum seperti musrenbang atau hearing DPRD yang belum optimal (Mean: 4.09)
- b) Meskipun pemerintah menyediakan ruang, tidak semua segmen masyarakat dapat mengaksesnya secara optimal
- c) Jadwal forum yang mungkin tidak fleksibel bagi masyarakat dengan keterbatasan waktu

### 2. Kapasitas Media Lokal

- a) Media lokal yang belum sepenuhnya independen dapat membatasi ruang penyampaian pendapat kritis
- b) Kapasitas jurnalis lokal yang perlu ditingkatkan
- c) Keberanian media menyampaikan berita kritis yang masih dapat diperkuat (Mean: 4.18)

## B. Hambatan Teknis dan Administratif

### 1. Pemahaman Prosedur

Meskipun prosedur perizinan dinilai tidak mempersulit (Mean: 4.21), sebagian masyarakat mungkin masih:

- a) Kurang memahami mekanisme penyampaian aspirasi
- b) Mengalami kendala teknis dalam mengakses platform digital
- c) Memerlukan panduan yang lebih jelas tentang tata cara partisipasi

## 2. Kesenjangan Digital

Meskipun infrastruktur internet dinilai baik, kemungkinan masih terdapat:

- a) Kesenjangan akses di area tertentu
- b) Perbedaan kemampuan literasi digital antar generasi
- c) Keterbatasan perangkat untuk akses digital

## C. Hambatan Kultural

### 1. Budaya Sungkan dan Harmoni

Kultur lokal yang menghargai harmoni sosial dapat menjadi:

- a) Faktor positif untuk toleransi
- b) Namun juga dapat menghambat ekspresi pendapat yang berbeda karena keinginan menjaga kerukunan

### 2. Kesadaran dan Literasi Politik

- a) Sebagian masyarakat mungkin belum sepenuhnya menyadari pentingnya partisipasi aktif
- b) Pemahaman tentang mekanisme demokrasi partisipatif yang perlu ditingkatkan
- c) Apatis politik yang mungkin muncul pada sebagian kelompok

## 4. Persepsi Masyarakat terhadap Jaminan Kebebasan Berpendapat di Kabupaten Tapin

Persepsi masyarakat terhadap jaminan kebebasan berpendapat di Kabupaten Tapin sangat positif, sebagaimana tercermin dalam indikator Persepsi Keseluruhan dengan indeks 80.22 (kategori "Baik"). Berikut analisis rinci persepsi masyarakat:

### **Keyakinan terhadap Perlindungan Hukum**

Mayoritas masyarakat memiliki keyakinan kuat bahwa hak berpendapat mereka dilindungi:

- a) Perlindungan hukum dan pemerintah (Mean: 4.28) - skor tertinggi dalam indikator ini
- b) Masyarakat yakin bahwa ada jaminan hukum yang melindungi hak mereka untuk menyampaikan pendapat
- c) Kepercayaan bahwa pemerintah berkomitmen melindungi kebebasan berpendapat

### **Persepsi Perbaikan Berkelanjutan**

Masyarakat melihat adanya tren positif:

- a) Kondisi kebebasan berpendapat semakin membaik dari waktu ke waktu (Mean: 4.24)

- b) Apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih kondusif
- c) Optimisme terhadap masa depan kebebasan berpendapat

### **Kesediaan Merekendasikan Partisipasi**

Tingkat kepuasan yang tinggi tercermin dari:

- a) Kesediaan merekendasikan kepada orang lain untuk aktif menyampaikan pendapat (Mean: 4.23)
- b) Kepercayaan diri bahwa menyampaikan pendapat adalah hal yang aman dan bermanfaat
- c) Indikasi bahwa masyarakat merasa sistem yang ada berfungsi dengan baik

### **Persepsi Keamanan yang Perlu Ditingkatkan**

Meskipun persepsi umumnya positif, terdapat aspek yang perlu perhatian:

- a) Persepsi kebebasan berpendapat tanpa rasa takut masih relatif lebih rendah (Mean: 4.09)
- b) Konsistensi dengan temuan pada indikator keamanan dari represi aparat
- c) Menunjukkan masih ada ruang untuk memperkuat rasa aman masyarakat

Berdasarkan pembahasan keempat rumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Tapin telah berhasil menciptakan ekosistem kebebasan berpendapat yang baik dengan indeks 80.17. Kekuatan utama terletak pada regulasi yang mendukung, toleransi masyarakat yang tinggi, infrastruktur memadai, dan responsivitas pemerintah yang baik. Meskipun demikian, masih terdapat area yang memerlukan peningkatan, terutama dalam hal keamanan dari represi aparat, partisipasi aktif masyarakat, dan kebebasan media. Dengan fokus perbaikan pada ketiga aspek tersebut, Kabupaten Tapin berpotensi mencapai tingkat kebebasan berpendapat yang lebih optimal, bahkan menuju kategori "Sangat Baik" (indeks >85).

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1.Kesimpulan

1. Tingkat kebebasan berpendapat masyarakat di Kabupaten Tapin berada pada tingkat yang baik dengan Indeks Kebebasan Berpendapat sebesar 80,17 dari skala 0-100, yang menunjukkan kondisi sangat kondusif bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Mayoritas besar masyarakat memiliki persepsi positif terhadap kebebasan berpendapat, dengan seluruh delapan indikator yang diukur menunjukkan kondisi yang baik tanpa ada satupun aspek yang berada dalam kategori buruk. Konsistensi persepsi positif ini terlihat merata di berbagai segmen masyarakat, baik dari segi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, maupun lokasi geografis, yang memperkuat validitas temuan bahwa Kabupaten Tapin telah berhasil menciptakan ekosistem yang mendukung terwujudnya kebebasan berpendapat sebagai pilar penting demokrasi lokal.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebebasan berpendapat masyarakat di Kabupaten Tapin dapat diidentifikasi menjadi empat faktor utama yang saling berinteraksi. Pertama, regulasi dan kebijakan pemerintah daerah yang sangat mendukung menjadi fondasi legal dan institusional bagi kebebasan berpendapat, di mana tidak ada peraturan daerah yang membatasi hak berpendapat, prosedur perizinan yang tidak mempersulit, dan kebijakan eksplisit yang melindungi hak warga untuk mengkritik kebijakan publik. Kedua, toleransi masyarakat yang sangat tinggi menciptakan rasa aman sosial, dengan minimnya kasus kekerasan antar warga akibat perbedaan pendapat dan kultur yang menghargai pluralisme pandangan. Ketiga, infrastruktur media dan komunikasi yang memadai memberikan sarana teknis bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui berbagai platform baik konvensional maupun digital. Keempat, responsivitas pemerintah yang baik memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan tidak hanya didengar tetapi juga ditindaklanjuti dengan nyata, yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas partisipasi mereka dalam proses demokratis.
3. Hambatan yang dihadapi masyarakat dalam mengekspresikan pendapat di Kabupaten Tapin relatif minimal dan tidak bersifat struktural atau sistemik, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian. Hambatan pertama berkaitan dengan kekhawatiran tertentu terhadap kemungkinan tindakan represif dari aparat, meskipun mayoritas masyarakat sudah merasa cukup aman, masih ada sebagian kecil yang

memiliki keraguan untuk menyampaikan pendapat yang sangat kritis terhadap pemerintah. Hambatan kedua adalah rendahnya tingkat partisipasi aktif dalam forum-forum publik formal seperti musrenbang atau hearing DPRD, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan waktu karena kesibukan bekerja, kurangnya kesadaran tentang pentingnya partisipasi, serta format forum yang dianggap terlalu formal atau kurang menarik oleh sebagian masyarakat. Hambatan ketiga terkait dengan kebebasan media lokal yang masih dapat diperkuat, di mana meskipun tidak ada sensor atau pembredelan, media lokal kadang masih self-censorship atau kurang berani dalam menyampaikan investigasi mendalam terhadap isu-isu sensitif yang melibatkan kepentingan kekuasaan.

4. Persepsi masyarakat terhadap jaminan kebebasan berpendapat di Kabupaten Tapin sangat positif dan optimistis, yang tercermin dari tingginya kepercayaan masyarakat bahwa hak berpendapat mereka dilindungi oleh hukum dan pemerintah. Masyarakat menilai bahwa kondisi kebebasan berpendapat semakin membaik dari waktu ke waktu, menunjukkan adanya tren positif dan komitmen berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam menjaga kebebasan sipil. Kepercayaan ini juga terlihat dari kesediaan mayoritas masyarakat untuk merekomendasikan kepada orang lain agar aktif menyampaikan pendapat, yang mengindikasikan tingkat keyakinan yang tinggi terhadap keamanan dan manfaat dari partisipasi dalam ruang publik. Secara keseluruhan, masyarakat merasakan bahwa Kabupaten Tapin telah menyediakan jaminan yang memadai bagi kebebasan berpendapat, baik melalui kerangka regulasi yang melindungi, kultur sosial yang toleran, maupun praktik pemerintahan yang responsif dan menghargai hak-hak sipil warganya.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut ini beberapa saran implementatif yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kebebasan berpendapat di Kabupaten Tapin:

1. Pemerintah Kabupaten Tapin perlu melakukan pelatihan berkala dan terstruktur kepada seluruh aparat, khususnya aparat keamanan, tentang penghormatan terhadap hak berpendapat warga dan pengelolaan kegiatan demonstrasi atau penyampaian pendapat yang aman. Pelatihan ini dapat bekerja sama dengan lembaga HAM, akademisi, atau organisasi masyarakat sipil untuk memastikan konten yang komprehensif mencakup pemahaman tentang hak asasi manusia, demokrasi, dan teknik-teknik deescalasi dalam

menghadapi situasi yang berpotensi konflik. Selain itu, perlu dibentuk mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan transparan bagi masyarakat yang merasa mengalami intimidasi atau tindakan tidak semestinya dari aparat ketika menyampaikan pendapat, lengkap dengan sistem monitoring dan sanksi yang tegas bagi aparat yang terbukti melanggar.

2. Pemerintah perlu melakukan inovasi format forum publik agar lebih menarik dan accessible dengan cara: (a) menyediakan jadwal forum di luar jam kerja atau akhir pekan untuk mengakomodasi warga yang bekerja; (b) menggunakan format yang lebih interaktif seperti town hall meeting, focus group discussion, atau world café yang mendorong dialog dua arah; (c) mengembangkan platform forum online atau hybrid yang memungkinkan partisipasi virtual bagi yang tidak bisa hadir secara fisik; (d) membuat ringkasan eksekutif dan infografis yang menarik tentang agenda dan hasil forum untuk disebarluaskan melalui media sosial; (e) memberikan apresiasi atau sertifikat bagi warga yang aktif berpartisipasi untuk mendorong keterlibatan lebih lanjut; dan (f) melakukan sosialisasi masif melalui berbagai kanal komunikasi termasuk radio komunitas, grup WhatsApp RT/RW, dan media sosial tentang pentingnya partisipasi dalam forum publik.
3. Pemerintah daerah perlu membangun sistem manajemen aspirasi masyarakat yang transparan dan dapat diakses publik, misalnya melalui dashboard digital yang menampilkan daftar aspirasi yang masuk, status penanganan, dan tindak lanjut yang telah dilakukan. Sistem ini harus terintegrasi dengan berbagai saluran penerimaan aspirasi seperti website resmi, aplikasi mobile, call center, surat, maupun forum publik, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan dan memantau aspirasi mereka. Setiap aspirasi harus memiliki nomor registrasi, timeline penanganan yang jelas, dan petugas yang bertanggung jawab, dengan komitmen memberikan feedback kepada masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Transparansi ini akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penyampaian pendapat.
4. Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan konkret kepada media lokal dan jurnalis melalui program pelatihan profesionalisme jurnalistik, pemberian akses informasi publik yang lebih mudah dan cepat, serta perlindungan hukum bagi jurnalis yang menjalankan tugas jurnalistik sesuai kode etik. Dapat dibentuk forum komunikasi reguler antara pemerintah dan media untuk membangun saling pemahaman tentang peran masing-masing dalam demokrasi, sekaligus sebagai sarana untuk menyampaikan kendala dan

mencari solusi bersama. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa tidak ada bentuk intimidasi, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap media atau jurnalis yang menyampaikan berita kritis, selama pemberitaan tersebut sesuai dengan prinsip jurnalisme yang bertanggung jawab. Dukungan infrastruktur seperti press room atau pusat informasi media juga dapat memfasilitasi kerja jurnalis dalam mengakses informasi dan meliput kegiatan pemerintahan.

5. Organisasi masyarakat sipil perlu melakukan program literasi kebebasan berpendapat yang sistematis dan berkelanjutan kepada berbagai kelompok masyarakat, khususnya kelompok pemuda, perempuan, dan komunitas akar rumput. Program ini dapat berupa workshop, diskusi publik, kampanye media sosial, atau pembuatan materi edukasi yang mudah dipahami tentang hak berpendapat, cara menyampaikan pendapat yang efektif dan bertanggung jawab, serta mekanisme pengaduan jika mengalami pelanggaran. Organisasi masyarakat sipil juga perlu menyediakan layanan pendampingan bagi masyarakat atau kelompok yang membutuhkan dukungan dalam menyampaikan aspirasi mereka, termasuk memfasilitasi dialog dengan pemerintah atau melakukan advokasi jika terjadi pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat.
6. Pemerintah Kabupaten Tapin perlu melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kondisi kebebasan berpendapat melalui survei atau penelitian yang dilakukan setiap dua tahun sekali. Hasil monitoring ini harus dijadikan dasar untuk menyusun rencana aksi peningkatan kebebasan berpendapat dengan target yang terukur, misalnya meningkatkan indeks kebebasan berpendapat dari 80.17 menjadi di atas 85 dalam tiga hingga lima tahun ke depan, dengan fokus khusus pada tiga indikator yang masih dalam kategori sedang yaitu keamanan dari represi aparat, partisipasi dalam forum publik, dan kebebasan media. Rencana aksi ini harus melibatkan berbagai stakeholder termasuk DPRD, organisasi masyarakat sipil, media, akademisi, dan tokoh masyarakat, untuk memastikan adanya komitmen bersama dan sinergi dalam implementasinya. Evaluasi berkala juga perlu dipublikasikan secara terbuka untuk membangun akuntabilitas dan partisipasi publik dalam pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). Indeks Demokrasi Indonesia 2019: Tantangan Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Bappenas.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin. (2024). Kabupaten Tapin Dalam Angka 2024. Rantau: BPS Kabupaten Tapin.
- Barendt, E. (2005). Freedom of Speech (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Berlin, I. (1969). Two Concepts of Liberty. In Four Essays on Liberty. Oxford: Oxford University Press.
- Dahl, R. A. (1989). Democracy and Its Critics. New Haven: Yale University Press.
- Donnelly, J. (2013). Universal Human Rights in Theory and Practice (3rd ed.). Ithaca: Cornell University Press.
- Fraser, N. (1990). Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy. *Social Text*, 25/26, 56-80.
- Habermas, J. (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge: MIT Press.
- Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge: MIT Press.
- Mill, J. S. (1859). On Liberty. London: John W. Parker and Son.
- Nugroho, R., & Wrihatnolo, R. (2008). Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar dan Agenda untuk Reformasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Purba, R. A., & Hariyadi, D. (2023). Kualitas Demokrasi dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 15(2), 145-162.
- Schauer, F. (1978). Fear, Risk and the First Amendment: Unraveling the Chilling Effect. *Boston University Law Review*, 58, 685-732.
- Sen, A. (1999). Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf.
- UN Human Rights Committee. (2011). General Comment No. 34: Article 19 (Freedoms of Opinion and Expression). CCPR/C/GC/34. Geneva: United Nations.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).